

CAPAIAN KINERJA 2025

1.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ **Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	<u>Indikator:</u> Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> Jumlah kebijakan yang	%	n/a	42,85	60*	63,6 4 (ses uai data Biro Kese jahte raan Raky at Setd	106, 07 (106 ,07= 63,6 4/60 *10 0%)	Sa ngat baik.	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode. <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi: I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri. II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri					a DIY)			

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dari 3 (tiga) Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum. III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak. IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaa n Gender dan Indikator Total Fertility Rate. V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		internasional) . Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah yang berhasil dicapai. Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3 dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual. Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2026, target capaian naik								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.								
1	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	<u>Indikator:</u> Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan <u>Meta Indikator:</u> Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitas keagamaan	%	n/a (perbedaan indikator karena belum ada RP D)	160	80*	103, 85 (sesuai data Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY)	129, 81	Sangat Baik	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> 1) Bidang Bina Mental = 1 rumusan bahan kebijakan. 2) Pelayanan Dasar terdapat 7 rumusan bahan kebijakan = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian. 3) Pelayanan Non Dasar terdapat 5 rumusan bahan kebijakan = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian. Maka total adalah 13 rumusan bahan kebijakan (akan menyesuaikan jumlah keluaran								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tahun berjalan). Hitungan capaian fasilitasi keagamaan : Fasili tasi Agama $4/4 \times 100\% = 100\%$ Target Hitungan persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan: Tahu $n \text{ 2025} = 8 \text{ dokumen}$ $\text{tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 80\%$ Tahu $n \text{ 2026} = 11 \text{ dokumen}$ $\text{tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 90\%$ Tahu $n \text{ 2027} = 13 \text{ dokumen}$ $\text{tahun } n / 13 \text{ dokumen} +$								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100% / 2 = 100% Perhitungan target capaian dilakukan secara tahunan dan bukan merupakan hasil akumulasi, melainkan berdasarkan pencapaian indikator pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan rasio 8 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang disyaratkan, ditambah dengan capaian fasilitasi keagamaan sebesar 100%, lalu dirata-rata, sehingga diperoleh nilai 80%.								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Selanjutnya , pada tahun 2026, capaian meningkat menjadi 90%, dihitung dari 11 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) ditambah capaian fasilitasi agama yang tetap 100%, kemudian dirata-rata. Pada tahun 2027, seluruh indikator berhasil dipenuhi dengan 13 rumusan bahan kebijakan dari 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang tersedia dan capaian fasilitasi								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		agama tetap di angka 100%, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 100%. Dengan demikian, setiap nilai tahunan merepresen tasikan evaluasi mandiri atas pelaksanaa n di tahun tersebut dan tidak menjumlahk an hasil tahun-tahun sebelumnya .								
2	Sasaran 2: Meningkatkan tata kelola penyelengga raan urusan pemerintaha n di perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi	kate gori	A	A (88.18)	(A) 92,08*	(A) 93,28 (sesu ai data Pem da DIY melal ui Biro Orga nisas i pada evalu asi RB setia p	101,30	Sa ngat Baik	(A) 92,10

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah. 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.					tahun)			

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.	Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi: I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri. II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum. III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak. IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate. V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan internasional). Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
			yang berhasil dicapai. Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3 dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual. Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2026, target capaian naik menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.

Realisasi capaian tujuan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung 5 (lima) program Pemerintah Daerah yang diukur melalui 11 (sebelas) indikator program. Adapun pada Tahun 2024, telah terealisasi 3 (tiga) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan prevalensi stunting, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1. Hingga Triwulan IV 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD yang mendukung 4 indikator program pemda (poin a-d) terdiri dari :
 - a. Persentase Desa Mandiri
 - Peraturan Gubernur DIY Nomor 9/2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan tanggal 24 Februari 2025.
 - b. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak
 - SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY tanggal 21 Maret 2025.
 - SK Gub DIY Nomor 92/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY tanggal 3 Juli 2025.

- SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY tanggal 21 Juli 2025.
- c. Indeks Pemberdayaan Gender.
- SE Gubernur DIY Nomor 3310/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY tanggal 8 Oktober 2025.
- d. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (Regional, nasional, internasional) :
- Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah DIY kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY perihal Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Tradisi di DIY Nomor B/400.6.1/4248/BR.8 tanggal 22 Desember 2025.
- e. Indeks Gini
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026/2027.
- f. Total Fertility Rate
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026/2027.
- g. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026.
- h. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026.
2. Hingga Triwulan IV 2025 terealisasi 7 indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.

Kinerja Tujuan Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase bahan kebijakan yang	42,5	60	63,64 (Terealisasi 7	106,07 (63,64/60*100%)	100	63,64% belum tercapai

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
mendukung program pemda <u>Meta Indikator :</u> Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode. Penjelasan detail meta indikator: Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi: I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri. II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri dari 3 (tiga)			indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.)			(Terealisasi 7 indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.)

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum. III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.						

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate. V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan internasional). Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah yang berhasil dicapai. Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3						

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual. Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2026, target capaian naik menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.						

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:erwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 63,64%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 60% yaitu sebesar 106,07% (terlampau).
- b. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina

Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.

c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 106,07%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Ketepatan menganalisa kebutuhan kebijakan.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar pemangku kepentingan
- c. Dukungan anggaran yang relatif mencukupi

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Tidak ada faktor penghambat.

Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	-			

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

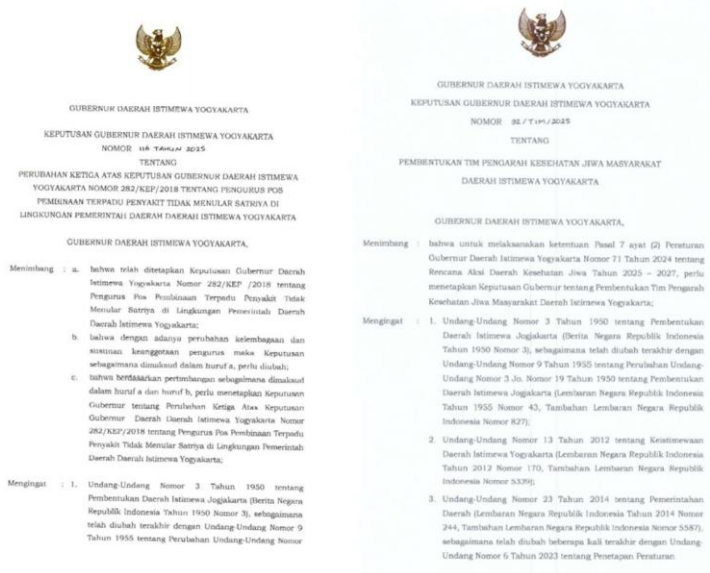
Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan	1) Bidang Bina Mental = 1 rumusan bahan kebijakan. 2) Pelayanan Dasar terdapat 7 rumusan bahan kebijakan = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian. 3) Pelayanan Non Dasar terdapat 5 rumusan bahan kebijakan = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian. Maka total adalah 13 rumusan bahan kebijakan (akan menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan). Hitungan capaian fasilitasi keagamaan : Fasilitasi Agama $4/4 \times 100\% = 100\%$ Target Hitungan persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan: Tahun 2025 = $8 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 80\%$ Tahun 2026 = $11 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 90\%$ Tahun 2027 = $13 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 100\%$

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
			Perhitungan target capaian dilakukan secara tahunan dan bukan merupakan hasil akumulasi, melainkan berdasarkan pencapaian indikator pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan rasio 8 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang disyaratkan, ditambah dengan capaian fasilitasi keagamaan sebesar 100%, lalu dirata-rata, sehingga diperoleh nilai 80%. Selanjutnya, pada tahun 2026, capaian meningkat menjadi 90%, dihitung dari 11 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) ditambah capaian fasilitasi agama yang tetap 100%, kemudian dirata-rata. Pada tahun 2027, seluruh indikator berhasil dipenuhi dengan 13 rumusan bahan kebijakan dari 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang tersedia dan capaian fasilitasi agama tetap di angka 100%, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 100%. Dengan demikian, setiap nilai tahunan merepresentasikan evaluasi mandiri atas pelaksanaan di tahun tersebut dan tidak menjumlahkan hasil tahun-tahun sebelumnya.

1. Kinerja Sasaran OPD hingga Triwulan IV 2025 pada indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non-pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:
 - a. Bahan kebijakan tersebut telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen = 103,85% yang didukung oleh:

- Bidang Mental (1) SK Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2025; (2) SE Nomor B/100.3.4/971/SET tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1446 H/ 2025M di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY;
- Bidang Pelayanan Dasar (1) SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY; (2) Policy Note Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan; (3) Ingub DIY Nomor B/100.3.4/2130/BR.8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kesehatan, Kebugaran, dan Keterampilan Nonteknis bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Policy Brief : Urgensi Penguatan Sistem Kesehatan Mental Terintegrasi di DIY Menuju Layanan Berkelanjutan dan Responsif; (5) SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY; (6) SK Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY; (7) Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Bidang non pelayanan dasar : (1) Rancangan Pergub DIY tentang Fasilitas Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; (2) Rancangan Pergub DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender; (3) SE Gubernur DIY Nomor 3310 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY; (4) SE Gubernur DIY tentang Penguatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY; (5) Policy Note Seni tradisi DIY : Arah Pemeliharaan dan Pengembangan;



Gambar III.1. Beberapa Dokumen Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2025

b. Perhitungan capaian fasilitasi keagamaan pada Triwulan IV yakni sebesar 100%, dengan rincian

1. Pembinaan Mental 5 Agama :

- Islam: Pengajian dalam rangka Nuzulul Quran, Maulid nabi, hari santri,
- Katolik: Natal, Paskah
- Kristen: Natal, Paskah
- Budha : Waisak
- Hindu : Nyepi

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan money), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta penghantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.

3. Fasilitasi Festival Keagamaan yaitu: penyelenggaraan STQH Tk. Daerah, pelatihan rutin dan eksebisi serta pengiriman kafilah ke STQH Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparani Daerah di DIY; penyelenggaraan pelatihan kontingen Pesparawi Nasional 2026.

4. Fasilitasi Peribadatan dan Hibah Kelembagaan kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY,

PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY);
monev lembaga, sosialisasi Perda Pesantren

Sehingga perhitungan capaian s.d. Triwulan IV 2025: $(107,69\% + 100\%)/2 = 103,85\%$.

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama:

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan <u>Meta Indikator :</u> Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf	160	80	103,85 (Bahan kebijakan tersebut telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen $(14/13 \times 100\% = 107,69\%)$ pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dari target 100 terealisasi	129,81 $(103,85/80 \times 100\%)$	100%	103,85% $(103,85/100 \times 100\%)$

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
kebijakan serta fasilitasi keagamaan			100% atau dengan Persentase 100%), maka perhitungannya $(107,69\% + 100\%)/2 = 103,85\%$)			

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya kelembagaan istimewa yang agile adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 103,85%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 129,81% (terlampai).
- b. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 103,85%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

Tabel III. 7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran

1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1. Program Kesejahteraan Rakyat		Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	5 dokumen	9 dokumen	180
		Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (ex Bermas)	4 dokumen	5 dokumen	125
	1.1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		2 dokumen	2 dokumen	100
	1.1.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100
	1.1.2. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	9 Lembaga	9 Lembaga	100
	1.2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		9 dokumen	12 dokumen	133,33

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	1.2.1. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 dokumen	3 dokumen	100
	1.2.2. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	9 dokumen	9 dokumen	100
	1.3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		15 dokumen	16 dokumen	106,67
	1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	16 dokumen	16 dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100
	2.1 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		12 laporan	12 laporan	100
	2.1.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 1		5.502.575.500	5.139.744.914	93,41%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. **Capaian Program Kesejahteraan Rakyat** menghasilkan bahan kebijakan yang telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen = 107,69% yang didukung oleh:
1. SK Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2025;
 2. SE Nomor B/100.3.4/971/SET tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1446 H/ 2025M di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY;
 3. SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY;
 4. Policy Note Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan;
 5. Ingub DIY Nomor B/100.3.4/2130/BR.8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kesehatan, Kebugaran, dan Keterampilan Nonteknis bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Policy Brief : Urgensi Penguatan Sistem Kesehatan Mental Terintegrasi di DIY Menuju Layanan Berkelanjutan dan Responsif;

7. SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY;
8. SK Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY;
9. Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
10. Rancangan Pergub DIY tentang Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
11. Rancangan Pergub DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
12. SE Gubernur DIY Nomor 3310 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY;
13. SE Gubernur DIY tentang Penguatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY;
14. Policy Note Seni tradisi DIY : Arah Pemeliharaan dan Pengembangan;

Penjelasan disertai dokumentasi.

Serta perhitungan capaian fasilitasi keagamaan pada Triwulan IV yakni sebesar 100%, dengan rincian

1. Pembinaan Mental 5 Agama :
 - a. Islam: Pengajian dalam rangka Nuzulul Quran, Maulid nabi, hari santri,
 - b. Katolik: Natal, Paskah
 - c. Kristen: Natal, Paskah
 - d. Budha : Waisak
 - e. Hindu : Nyepi
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan monev), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta penghantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.
 3. Fasilitasi Festival Keagamaan yaitu: penyelenggaraan STQH Tk. Daerah, pelatihan rutin dan eksebisi serta pengiriman kafilah ke STQH Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparani Daerah di DIY; penyelenggaraan pelatihan kontingen Pesparawi Nasional 2026.
 4. Fasilitasi Peribadatan dan Hibah Kelembagaan kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY, PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY); monev lembaga, sosialisasi Perda Pesantren.
- b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan telah terealisasi sebanyak 12 laporan. Terkait TUK (Target Ukuran Kegiatan) pada sub kegiatan, terdapat beberapa penyesuaian, yaitu :
- Pengurangan kegiatan: Pesparawi Nasional dan Peringatan Isra' Miraj
 - Penambahan kegiatan: Persiapan Pesparawi Nasional

Penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas program.

Rincian dari 12 laporan tersebut adalah :

1. Laporan Pesparani Daerah
2. Laporan STQ Daerah dan Nasional
3. Laporan Pelatihan persiapan Kontingen Pesparawi Nasional
4. Laporan Hari Santri,
5. Laporan Natal,
6. Laporan Nyepi,
7. Laporan Paskah,
8. Laporan Waisak,
9. Laporan Maulid Nabi
10. Laporan Nuzulul Quran
11. Laporan Kampung Berkah
12. Laporan Pembinaan Mental (Pengajian Pejabat Aparat)

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun regulasi terkait kesejahteraan rakyat
- b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait perumusan bahan kebijakan strategis
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Tidak ada faktor penghambat.

Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	-			

1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 38 (tiga puluh delapan) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *Leading Sector*/Koordinator Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025

N o	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	82,23	11,05	93,28	A	Memuaskan	83,78	8,29	92,07	1,21

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY Januari 2026

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator :</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah	A (92,07)	A (92,08)*	A (93,28) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	101,30% (93,28/92,08 x100%)	A (92,10)*	101,28% (93,28/92,10 x 100%)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

a. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025,

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 93,28 dengan Kategori A (Memuaskan);

- b. Target tahun 2025 92,08 realisasi 93,28, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,30% (terlampau).
- c. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.
- d. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 101,28%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,58	92,15	101,73
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100

	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				

	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	2 Paket	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100
	3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	100
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100
	Total Anggaran Pendukung		339.264.500	258.626.108	76,23

Capaian tersebut didukung dari **Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang didukung oleh nilai PKKI yang baik. Beberapa faktor pendukung keberhasilan meliputi:

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- Koordinasi internal dan eksternal yang baik
- Dukungan anggaran baik melalui APBD
- Teknologi dan informasi penunjang kegiatan yang mendukung

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Tidak ada hambatan berarti